PEMBINAAN NARAPIDANA TIPIKOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Finsensius Samara¹, Amanda Winriyarti Silly², Fransiska N. Supadi³, Yakobus K. Soo⁴,
Fransiskus A. Pau⁵, Kristian U. Limu⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas katolik widya mandira kupang

Email: finsensiussamarafh@gmail.com, windreymanda@gmail.com, supadinona@gmail.com,
yakobussoo6@gmail.com, fransiskusAlbertus25@gmail.com, kriskaranggu@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan karakter yang meliputi Olah Hati, Olah Pikir, Olah Raga serta Olah Rasa dan Karsa terhadap warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa faktor-faktor penghambat dalam pembinaan karakter para warga binaan tipikor adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas karena rasio petugas lapas dan pembina tidak sesuai dengan jumlah warga binaan. Sedangkan, secara kualitas lapas tidak memiliki SDM yang mendukung pembinaan olah pikir karena membutuhkan tenaga atau sumber daya yang profesional. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada yaitu melibatkan SDM yang mempunyai latar belakang dalam olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa yang ada dalam Lapas Kelas IIA Kupang baik staf maupun warga binaan untuk menjadi pembina bagi warga binaan lainnya, sehingga program pembinaan tidak tersendat dan dengan adanya dukungan dari pihak ketiga.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter; Pola Pembinaan; Warga Binaan Tipikor

Abstract

This research aims to know the way of character building included heart learning, thought learning, sport learning, sense and work learning, to know the problems of implementing character building program regarding heart learning, thought learning, sport learning, sense and work learning. This study used analytical descriptive qualitative. The result of this research shows that the inhibiting factors in character building development for corruptors are the lack of human resource in quality and quantity. The lack of human resources in quantity because the ratio of officers in correction department do not appropriate with the number of currptors. In quantity, correction department does not have good human resource in supporting the character building of thought learning because it needs professional staffs. The efforts to solve the problems of implementing character building through human resource empowerment. Namely involving human resources who have an education background in the correction department Class IIA Kupang, both staff and inmates, to become coaches for other inmates, so that the coaching program does not stagnate and with the support of a third party

Keywords: Character Education; Learning Model; Corruptors

PENDAHULUAN

Pembinaan narapidana tipikor di lembaga pemasyarakatan adalah proses untuk mengubah narapidana menjadi pribadi yang lebih baik melalui berbagai kegiatan rohani dan jasmani. Tujuannya agar narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan sehat dan berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab

Lapas dewasa adalah lembaga pemasyarakatan yang menampung narapidana pria dewasa yang sedang menjalani hukuman penjara. Lapas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik narapidana dewasa, baik dari segi psikologis maupun sosial.

Pembinaan narapidana tipikor di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bertujuan untuk membangun narapidana menjadi pribadi yang baik dan dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Pembinaan ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti: Pembinaan kepribadian, Pembinaan kemandirian, Pembinaan kesadaran beragama, Bimbingan sosial, Bimbingan kerokhanian.

Pembinaan narapidana tipikor dilakukan dengan memperlakukan mereka sama dengan narapidana lainnya. Sasaran pembinaan bukan berdasarkan status sosial narapidana, melainkan kebutuhan pemulihan perilaku kriminalitas.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana, yaitu: Memberikan bimbingan dan pendidik, Mempersiapkan sarana, Mengelola hasil kerja, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pembinaan narapidana yang efektif dapat menurunkan angka residivisme di Indonesia.

Dalam konteks Pembinaan narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) perlu dilakukan untuk membantu narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pembinaan ini diharapkan dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial tahanan tipikor, serta memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga selama menjalani masa tahanan.

METODE PENELITIAN

Artikel jurnal ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan wawancara. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang **PEMBINAAN NARAPIDANA TIPIKOR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN** di Lapas kelas IIA Kota Kupang. Ini melibatkan analisis melalui wawancara, observasi dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana bentuk penanganan terhadap narapidana Korupsi di Lapas Kota Kupang? Apakah ada aturan atau regulasi khusus?

Sistem pembinaan terhadap narapidana yang diterapkan adalah kebijakan yang banyak berorientasi pada masyarakat (community based sentences) dibandingkan dengan hukuman pemenjaraan. Tujuan pembinaan narapidana yang relatif sama yakni untuk memenuhi keseimbangan dalam memperbaiki terpidana agar tidak mengulangi perbuatan serupa dan mempersiapkan para narapidana kembali kemasyarakatnya ketika masa hukumannya berakhir. Program pembinaan di Lapas Kupang dirancang untuk membantu narapidana korupsi memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Mekanisme pemindahan tahanan wanita dewasa di Lapas Kota Kupang merupakan bagian integral dari sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa tahanan dipindahkan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai latar belakang dan regulasi yang mengatur pemindahan tahanan.

2. Aturan dan Regulasi Khusus Dalam proses pembinaan narapidana tipikor, terdapat beberapa aturan dan regulasi yang harus diikuti, antara lain:

- **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:** Mengatur tata cara dan pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:** Mengatur pembebasan bersyarat bagi narapidana Tipikor, di antaranya wajib bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar perkara.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:** Mengatur bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan.

Selain itu, narapidana Tipikor juga harus:

- Menunjukkan perkembangan baik secara moral dan budi pekerti
- Mengikuti kegiatan program pembinaan secara rajin dan tekun
- Tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama kurang lebih minimal 9 bulan terakhir
- Menjalankan masa pidana 2/3 sesuai dengan masa pidananya masing-masing

2. Berapa jumlah narapidana kasus tipikor di lapas kupang? dan Tindak pidana korupsi apa saja yang di lakukan narapidana tersebut?

Berikut adalah profil dari narapidan korupsi di Lapas kelas IIA Kota Kupang, berdasarkan informasi yang tersedia:

1. Profil Narapidana Kasus Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kupang

- Jumlah Narapidana: 80 orang (data per Oktober 2024)
- Usia: Kisaran antara 30 hingga 60 tahun.
- Jenis Kelamin: -
- Lama Penahanan: Jangka waktu penahanan bervariasi, tergantung pada vonis yang dijatuhkan.

2. Berikut adalah tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kota Kupang, berdasarkan informasi yang tersedia tentang tindak pidana korupsi:

1. Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau pihak terkait dalam proses pengadaan yang dibiayai oleh anggaran negara. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti suap, kolusi, dan nepotisme, yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan keuangan negara.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering kali terjadi karena proses yang tidak transparan dan adanya kesepakatan tersembunyi antara pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa. Menurut data, lebih dari setengah kasus korupsi di Indonesia terjadi di sektor ini, dengan 57% berasal dari proyek konstruksi dan 32% dari pengadaan barang. Pola-pola penyelewengan dapat terjadi pada setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, termasuk praktik seperti pengaturan spesifikasi, suap dalam pemilihan kontraktor, dan mark-up harga. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana bagi pelaku korupsi dapat berupa penjara dan denda yang bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran. Pelanggaran hukum ini mencakup penerimaan suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian negara.

2. Korupsi Suap

Korupsi suap merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang umum terjadi, terutama di sektor publik. Dalam konteks ini, suap didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk memengaruhi keputusan atau tindakan mereka dalam menjalankan tugas resmi mereka. Suap dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa uang maupun barang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, seperti mempermudah

proses administrasi, memenangkan tender, atau mendapatkan izin tertentu. Tindakan ini sering kali melibatkan dua pihak: penyuap dari sektor swasta dan penerima suap yang biasanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Di Indonesia, tindak pidana suap diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk:

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31/1999 menyatakan bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud untuk memengaruhi tindakan mereka dapat dipidana dengan hukuman penjara antara 1 hingga 5 tahun dan denda.

2. Penggelapan

Penggelapan didefinisikan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindakan seseorang yang secara sengaja menguasai barang milik orang lain yang berada padanya tanpa melalui tindakan kejahatan. Tindakan ini dapat dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp 200 Juta.

Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Gratifikasi:

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi yang diatur dalam hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal-pasal berikut ini dijelaskan ketentuan dan sanksi terkait gratifikasi:

- Pasal 12B: Menyatakan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatan atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerima gratifikasi dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
- Pasal 12C: Mengatur bahwa penerima gratifikasi harus melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja setelah penerimaan. Jika dilaporkan tepat waktu, penerima tidak akan dikenakan sanksi pidana.
- Pasal 16 UU No. 30/2002: Mengatur kewajiban pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri kepada KPK.

4. Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses ilegal yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal. Dalam konteks hukum Indonesia, pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Menurut undang-undang ini, pencucian uang mencakup berbagai tindakan seperti menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Dasar hukum yang mengatur pencucian uang di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010: Menyediakan definisi dan sanksi bagi pelaku pencucian uang. Pasal 3 UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan

tindakan pencucian uang dapat dikenakan pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar²³.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Merupakan revisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mencakup ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang.

Hubungan antara Korupsi dan Pencucian Uang:

Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan perekonomian negara. Hasil dari korupsi sering kali menjadi sumber dana yang kemudian dicuci melalui proses pencucian uang. Dengan demikian, pencucian uang sering kali dianggap sebagai tindak lanjut dari korupsi, di mana pelaku berusaha untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka dari aparat penegak hukum.

3. apakah jumlah dari narapidana Tipikor mempengaruhi tingkat keefektivitas pembinaan terhadap narapidana?

Efektivitas merupakan adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan manusia yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Adanya efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program, kegiatan yang menyatakan sebagaimana tujuan dan mencapai target- targetnya. Melalui konsep efektivitas, program suatu organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dapat ditinjau dari sisi input, proses, maupun outputnya. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana diperlukannya suatu efektivitas agar pembinaan yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan dari adanya efektivitas tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan program pembinaan kepribadian khususnya dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara pada lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan konteks program ini yaitu apakah pelaksanaan program pembinaan kepribadian telah sesuai dengan target program yang ditetapkan.

Selain itu, dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan. Metode pembinaan seperti Pembinaan Kepribadian yang mencakup pembinaan agama dan rohani, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan pembinaan lain yang sifatnya membangun mental dan karakter narapidana, serta Pembinaan Kemandirian yang bersifat mengembangkan bakat dan keterampilan narapidana yang dilakukan dengan pelatihan kerajinan yang dapat meningkatkan keterampilan pada diri narapidana. Pembinaan perilaku narapidana merupakan suatu penyampaian materi atau suatu kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik khususnya dalam perubahan berpikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

Penerapan pembinaan yang disiplin kepada narapidana merupakan suatu metode dalam pembinaan agar pembinaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna tercapainya suatu tujuan pembinaan dalam menyadarkan narapidana agar dapat berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kedisiplinan yang diterapkan dalam pembinaan terhadap narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lapas.

4. Bagaimana Program Pembinaan terhadap Narapidana Korupsi di Lapas Kupang?

Program pembinaan di Lapas Kupang mencakup pelatihan moral dan etika untuk membantu narapidana korupsi memahami kesalahan mereka dan membangun kembali nilai-nilai moral. Narapidana korupsi diberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari pekerjaan setelah bebas. Konseling dan terapi psikologis ditawarkan untuk membantu narapidana korupsi mengatasi trauma masa lalu dan membangun kembali kesehatan mental mereka. Program keagamaan tersedia untuk membantu narapidana korupsi menemukan ketenangan batin dan meningkatkan spiritualitas mereka. Narapidana korupsi diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

5. Tantangan apa yang dihadapi oleh para pegawai lapas dalam menangani para narapidana tipikor?

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan adalah suatu institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian, dimana jenis pembinaan ini bertujuan agar narapidana menyesali kesalahannya, berjanji tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan aktif dan produktif dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, pembinaan yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi, hal ini disebabkan karena narapidana korupsi adalah narapidana yang sangat berbeda, baik dari latar belakang kehidupan, tingkat intelektual, dan kehidupan ekonomi, sehingga hal ini menimbulkan kendala bagi petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kupang menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk menjalankan program pembinaan secara efektif. Narapidana korupsi sering kali memiliki pengaruh dan kekuasaan yang dapat digunakan untuk memanipulasi sistem pembinaan. Narapidana korupsi sering kali berasal dari kalangan elit, sehingga sulit untuk membangun hubungan yang setara dengan narapidana kasus lainnya. Narapidana korupsi sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, sehingga sulit untuk kembali berintegrasi ke masyarakat setelah bebas.

Untuk mengatasi kendala dalam pembinaan narapidana kasus korupsi diperlukan perhatian dan solusi agar pembinaan dapat segera direalisasikan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perhatian dan solusi tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan suatu program yang baik dalam pembinaan narapidana kasus korupsi, Meningkatkan sumberdaya manusia petugas Lapas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan serta memberi motivasi kepada petugas agar dapat melaksanakan pembinaan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan fungsi manajemen dalam pembinaan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan sistem pembinaan yang terdiri dari tahap-tahap yang harus dipenuhi, yaitu diawali dengan perencanaan, diikuti pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha pembinaan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan.

6. Berapa lama penahanan Narapidana Tipikor di Lapas Kupang?

Penahanan tersangka sebelum diajukan ke Pengadilan, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat didalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Pasal 24:

- Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari;
- Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari;
- Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- Setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

b. Pasal 25:

- Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari;
- Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Proses yang akan dijalani oleh tersangka antara lain sebagai berikut:

a. Pemeriksaan tersangka;

- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- j. Pelaksanaan dan putusan pengadilan.

Atas penahanan tersebut hal yang dapat/harus dilakukan oleh keluarga tersangka adalah dengan membantu proses penyelidikan dan meminta bantuan kepada penasehat hukum.

Keluarga tersangka dapat melakukan atau mengajukan tuntutan balik melalui Praperadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 77 KUHAP yang pada pokoknya meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan.

Berikut adalah hasil penelitian tentang lama penahanan narapidana tipikor di Lapas kelas IIA Kupang

1. Rentang Waktu Penahanan

Berdasarkan hasil wawancara dan data umum, rentang waktu penahanan narapidana tipikor di Indonesia biasanya berkisar antara beberapa bulan hingga beberapa tahun: Lama penahanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- Tindak pidana korupsi yang lebih serius biasanya dihukum dengan masa penahanan yang lebih lama.

- Semakin besar kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, semakin lama masa penahanan yang dijatuhkan.
- Narapidana yang berperan sebagai aktor utama dalam tindak pidana korupsi biasanya dihukum dengan masa penahanan yang lebih lama dibandingkan dengan mereka yang berperan sebagai pelaksana.
- Lama penahanan ditentukan oleh putusan pengadilan yang mempertimbangkan faktor-faktor di atas.

2. Perbandingan dengan Narapidana Kasus Lainnya

Narapidana tipikor sering kali mendapatkan masa penahanan yang lebih lama dibandingkan dengan narapidana kasus lainnya, seperti kejahatan kekerasan atau pencurian. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius karena dampaknya yang luas terhadap negara dan masyarakat.
- Tindak pidana korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem hukum. Masa penahanan yang lebih lama diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana korupsi.

Seringkali muncul ketidakpuasan masyarakat karena ringannya pemberian hukuman kepada para koruptor, Akibat pendeknya masa penahanan narapidana korupsi yang terhitung pendek juga.

KESIMPULAN

Kasus tindak pidana korupsi di Lapas Kupang menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Peningkatan sistem peradilan pidana, program pembinaan, dan dukungan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana tipikor. Penting untuk

diingat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, dan upaya untuk memberantas korupsi harus terus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius di Indonesia dan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus. Meskipun terdapat kebijakan pemasyarakatan berbasis masyarakat (*community-based sentences*) di Lapas Kupang, data dan informasi mengenai penanganan narapidana tipikor masih terbatas. Terdapat 80 narapidana tipikor di Lapas Kota Kupang pada bulan Oktober 2024, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi masalah serius di wilayah tersebut.

Jangka waktu penahanan narapidana tipikor bervariasi, ada yang relatif singkat dan ada yang lama tergantung pada vonis yang dijatuhkan. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih menghadapi tantangan dalam menentukan hukuman yang adil dan efektif untuk tindak pidana korupsi. Pembinaan narapidana tipikor di Lapas Kupang menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya, pengaruh dan kekuasaan narapidana, kesenjangan sosial, dan stigma masyarakat. Tantangan ini mempersulit upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana tipikor.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan proses Pembinaan narapidana tipikor di Lapas Kupang:

1. Tingkatkan kerjasama antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran informasi, koordinasi program, dan pengembangan strategi bersama.
2. Alokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung program pembinaan narapidana tipikor, termasuk tenaga ahli, fasilitas, dan anggaran. Investasi ini akan

membantu meningkatkan kualitas program pembinaan dan meningkatkan peluang keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

3. Lakukan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberantas korupsi dan mendukung program pembinaan narapidana tipikor. Kurangi stigma negatif terhadap narapidana tipikor dan dorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
4. Rancang program pembinaan yang lebih terstruktur dan terarah untuk narapidana tipikor, dengan fokus pada rehabilitasi moral, pengembangan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Pertimbangkan kebutuhan individu dan berikan kesempatan bagi narapidana untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Harson, C. I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995

Samosir, C. Djisman. *penologi dan pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aukia, 2016

Andi Wijaya Arivai. (2014). *Buku pintar pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga kajian pemasyarakatan

Zulfikri; Eko Hariyanto, supervesior; Johannes Sutoyo, examiner (program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007)

Mulyadi S.H, LL.M, anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Jakarta Pusat

Pastikan untuk menyesuaikan format dan informasi sesuai dengan gaya penulisan yang Anda gunakan (APA, MLA, Chicago, dll.) dan menambahkan detail yang relevan jika diperlukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Fatwa Mahkamah Agung tentang Penahanan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan

Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara